

**ANALISIS STRATEGI PERAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
SIDOARJO DALAM MENCIPTAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
(Suatu Studi tentang Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah)**

**Tutut Putri Ramadani**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[tututputri07@gmail.com](mailto:tututputri07@gmail.com)

**Endang Indartuti**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[endangindartuti@untag-sby.ac.id](mailto:endangindartuti@untag-sby.ac.id)

**Eddy Wahyudi**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ediwahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:ediwahyudi@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the strategies of the Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo in supporting the creation of a Child-Friendly Regency, focusing on the issue of Out-of-School Children. Education is one of the key clusters in assessing a Child-Friendly Regency, where a low number of out-of-school children indicates the successful fulfillment of children's right to education. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants include representatives from the Sidoarjo Regency Office of Education and Culture, the Head of Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo, and learners who were previously categorized as out-of-school children. The study employs Nawawi's strategy theory (2012), which includes five indicators of strategic success: public profitability, high productivity, competitive position, technological superiority, and human resource excellence. In addition, a SWOT analysis based on Robbins and Pearce (1997) is used to identify internal and external factors influencing the strategy. The research findings indicate that the strategies implemented by the Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo have been carried out in a structured manner and have had a positive impact on reducing the number of out-of-school children. The free education services are considered inclusive and efficient, with high learner participation and good graduation rates. Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo also demonstrates program flexibility, utilizes digital technology for learning and data management, and possesses committed and adaptive human resources. However, several challenges remain, such as the unequal distribution of Indonesia Smart Program assistance, limited tracer studies for graduates, and insufficient public outreach and socialization. Overall, the strategies

implemented by Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo reflect a progressive direction in supporting the fulfillment of children's right to education, although further improvement is needed through stronger cross-sectoral synergy, data integration, and wider program dissemination.

**Keywords:** *Out-of-School Children, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo, Child-Friendly Regency.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah sebagai kontribusi terhadap pencapaian Kabupaten Layak Anak. Pendidikan merupakan salah satu klaster penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak, di mana rendahnya angka Anak Tidak Sekolah menjadi indikator keberhasilan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo, dan Warga Belajar yang pernah terdata Anak Tidak Sekolah. Teori yang digunakan adalah teori strategi Nawawi (2012), yang mencakup lima indikator keberhasilan strategi yaitu profitabilitas publik, produktivitas tinggi, posisi kompetitif, keunggulan teknologi, dan keunggulan Sumber Daya Manusia. Selain itu, digunakan pula analisis SWOT menurut Robbins dan Pearce (1997) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo telah dilaksanakan secara terstruktur dan berdampak positif dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah. Layanan pendidikan gratis dinilai inklusif dan efisien, dengan partisipasi warga belajar yang tinggi serta tingkat kelulusan yang baik. Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo juga menunjukkan fleksibilitas program, memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran dan pendataan, serta memiliki Sumber Daya Manusia yang berkomitmen dan adaptif. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti belum meratanya distribusi bantuan PIP, keterbatasan *tracer study* untuk lulusan, dan kurangnya sosialisasi program ke masyarakat. Secara keseluruhan, strategi yang dijalankan Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo menunjukkan arah yang progresif dalam mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran data, dan jangkauan sosialisasi yang lebih luas.

**Kata Kunci:** *Anak Tidak Sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo, Kabupaten Layak Anak.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan subjek utama dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus generasi penerus bangsa yang hak-haknya wajib dipenuhi secara menyeluruh. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan “bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak sesuai dengan usia dan tahap

tumbuh kembangnya”. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut secara merata, khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menginisiasi kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022. Kebijakan ini mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan tersebut dengan memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kategori menjadi Utama sebagai bentuk akselerasi dalam pembangunan ramah anak. Meski demikian, tantangan krusial masih ditemukan dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan.

Tabel 1. Hasil Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sidoarjo

Alasan Verifikasi	DO	LTM	Jumlah	Alasan Verifikasi	DO	LTM	Jumlah
Tidak mau sekolah	415	248	663	Bekerja	381	470	851
Tidak ada biaya	73	227	300	Pengaruh lingkungan	42	12	54
Sekolah jauh dari rumah	10	4	14	Beranggapan sekolah tidak penting	5	0	5
Sudah cukup dengan pendidikannya	89	59	148	Masalah kesehatan	25	51	76
Menikah	101	108	209	Lainnya	196	176	372
Mengalami perundungan	2	0	2	<b>TOTAL</b>	<b>1.339</b>	<b>1.355</b>	<b>2.694</b>

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap pelaksanaan APBD, ditemukan bahwa tidak semua anak di Kabupaten Sidoarjo telah menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini memunculkan fenomena Anak Tidak Sekolah, yaitu anak-anak usia sekolah yang tidak menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beberapa faktor penyebab Anak Tidak Sekolah di antaranya adalah keterpaksaan bekerja, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya motivasi belajar, hingga konflik internal keluarga, dll. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan dan lemahnya sistem pendukung di tingkat akar rumput, termasuk sekolah dasar sebagai garda terdepan. Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, keberadaan Anak Tidak Sekolah menjadi indikator negatif yang dapat menghambat

peningkatan kualitas dan capaian kebijakan, serta menunjukkan adanya kebutuhan strategis untuk mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan yang selama ini digunakan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah adalah dengan membangun lembaga pendidikan nonformal yakni Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peran Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah sebagai kontribusi terhadap pencapaian Kabupaten Layak Anak. Penelitian menggunakan teori strategi organisasi publik dari Nawawi (2012), yang mengukur keberhasilan strategi berdasarkan lima indikator: profitabilitas publik, produktivitas tinggi, posisi kompetitif, keunggulan teknologi, dan keunggulan Sumber Daya Manusia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam memperkuat strategi pendidikan inklusif, khususnya di daerah yang sedang mengembangkan model Kabupaten Layak Anak.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Manajemen Strategi**

Manajemen strategi merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan serangkaian keputusan serta tindakan strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sektor publik, manajemen strategi memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sektor privat. Jika sektor privat menitikberatkan pada pencapaian keuntungan atau laba sebagai indikator keberhasilan, maka sektor publik berfokus pada pemberian pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Nawawi (2012) menjelaskan bahwa “manajemen strategi di sektor publik merupakan arah kebijakan dan serangkaian keputusan strategis yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan utama organisasi, yakni kesejahteraan masyarakat”. Manajemen strategi dalam sektor publik merupakan proses yang sistematis dan terarah guna mencapai tujuan utama organisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Nawawi (2012) membagi proses manajemen strategi menjadi tiga langkah utama, yaitu :

#### **a. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam proses manajemen strategi yang bertujuan untuk merancang arah kebijakan dan program jangka panjang suatu organisasi publik. Fokus utama pada tahap ini adalah menyusun strategi berdasarkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, dengan tujuan menentukan arah organisasi dalam merespon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.. Kegiatan dalam perumusan strategi meliputi:

- Analisis lingkungan internal dan eksternal, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT).
- Penetapan visi dan misi, yakni visi menggambarkan cita-cita jangka panjang, sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi.

- Penentuan tujuan strategis, yakni menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu secara terukur dan relevan.
- Identifikasi masalah strategis, yakni fokus pada permasalahan inti yang harus ditangani agar tujuan tercapai.
- Formulasi alternative strategi, yakni pengembangan berbagai pendekatan atau kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

b. Pelaksanaan Strategi

Tahap pelaksanaan strategi merupakan proses mengubah strategi yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata. Ini mencakup implementasi kebijakan, program, serta alokasi sumber daya yang diperlukan, dengan tujuan memastikan strategi dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan :

- Pengorganisasian dan penugasan, yakni membagi tugas ke dalam unit-unit kerja sesuai peran dan tanggung jawab.
- Mobilisasi sumber daya, yakni meliputi anggaran, sumber daya manusia, waktu, dan teknologi.
- Pengawasan dan koordinasi, yakni mengawasi jalannya pelaksanaan agar tetap sesuai rencana dan tujuan.
- Komunikasi strategi, yakni menyampaikan strategi ke seluruh pihak internal agar terjadi pemahaman dan keterlibatan.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan organisasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin strategi tetap relevan dengan dinamika lingkungan, sehingga menjamin keberlanjutan dan relevansi strategi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal.

- Penilaian kinerja, yakni mengukur hasil terhadap indikator keberhasilan.
- Identifikasi hambatan dan masalah, yakni mencari faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan.
- Penyesuaian strategi, yakni melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap kebijakan atau program berdasarkan hasil evaluasi.
- Umpan balik dari *stakeholder*, yakni melibatkan masyarakat dan mitra kerja dalam proses evaluasi.

Menurut Nawawi (2012) dalam bukunya Manajemen Strategik Organisasi Non Profit, terdapat lima indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi dalam organisasi sektor publik. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur sejauh mana implementasi strategi mampu memenuhi tujuan organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan profit.

a. Profitabilitas Publik

Keunggulan dalam profitabilitas ditandai dengan terselenggaranya pekerjaan atau pelayanan secara efektif dan efisien, serta penggunaan anggaran yang hemat dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa

organisasi mampu meminimalisir pemborosan sumber daya serta memaksimalkan hasil layanan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

b. Produktivitas Tinggi

Indikator ini terlihat dari meningkatnya jumlah pekerjaan atau pelayanan yang dapat diselesaikan (aspek kuantitatif), berkurangnya kesalahan kerja, serta meningkatnya kualitas hasil kerja. Keberhasilan strategi tercermin pula dalam kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan kebutuhan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Posisi Kompetitif

Keunggulan kompetitif dicapai ketika eksistensi organisasi sektor publik diakui, dihargai, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan aturan layanan yang ditetapkan, serta persepsi positif masyarakat terhadap mutu produk atau jasa layanan publik yang dihasilkan. Keberhasilan strategi membuat organisasi lebih dipercaya dan relevan di tengah kebutuhan masyarakat.

d. Keunggulan Teknologi

Organisasi sektor publik dikatakan berhasil secara strategis apabila mampu memanfaatkan teknologi secara tepat dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Pelayanan publik dilaksanakan dengan lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Penggunaan teknologi juga membantu mengurangi kesalahan kerja dan memungkinkan penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kompleksitas masalah sosial.

e. Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi. Dalam organisasi non-profit seperti instansi pemerintah, pengembangan budaya kerja yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan sangat penting. SDM yang berkualitas yang terus dikembangkan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap akan menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, SDM yang andal juga mampu menjadi problem solver atas tantangan organisasi saat ini dan masa mendatang.

## 2. Analisis SWOT

Beberapa ahli dalam bidang kebijakan publik memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana analisis SWOT dapat diterapkan dalam konteks publik. Menurut Robinson dan Pearce (1997), analisis SWOT adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar, yaitu:

- a. Kekuatan (*Strengths*): Faktor internal yang menguntungkan kebijakan, seperti adanya dukungan politis, sumber daya yang cukup, dan kebijakan yang sudah memiliki fondasi kuat.
- b. Kelemahan (*Weaknesses*): Keterbatasan dalam implementasi kebijakan, seperti ketidakmampuan untuk menanggapi tantangan eksternal atau kurangnya keterlibatan masyarakat.

- c. Peluang (*Opportunities*): Perubahan sosial atau politik yang memberi ruang bagi perubahan kebijakan atau perluasan kebijakan yang lebih inklusif.
- d. Ancaman (*Threats*): Faktor eksternal yang menghambat implementasi kebijakan, seperti perubahan anggaran, ketidakstabilan politik, atau konflik sosial yang dapat menggagalkan kebijakan.

Analisis SWOT dapat digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal (peluang dan ancaman) serta kekuatan internal (kebijakan yang ada dan dukungan sumber daya). SWOT membantu untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan serta ancaman eksternal yang mungkin dihadapi oleh mereka yang berada di garis depan kebijakan. Analisis SWOT membantu pembuat kebijakan untuk lebih memahami kekuatan dan kelemahan internal dalam kebijakan yang diterapkan, serta untuk menilai ancaman dan peluang eksternal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

### **3. Kabupaten Layak Anak**

Kabupaten Layak Anak adalah konsep kota yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, seperti hak kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan non diskriminasi (UNICEF, 2021). Kota yang layak anak adalah kota yang dapat menghormati hak-hak anak. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, serta menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pada pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Kelembagaan dan lima Klaster Hak Anak. Indikator-indikator tersebut antara lain :

- a. Kelembagaan  
Adanya peraturan atau kebijakan tentang KLA, penguatan kelembagaan, dan peran dari lembaga masyarakat, media masa, dan dunia usaha
- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan  
Klaster ini berkaitan dengan hak anak untuk diakui keberadaannya sebagai warga negara, memiliki nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan hak untuk menyatakan pendapat, berekspresi, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.
- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Klaster ini fokus pada hak anak untuk hidup dan diasuh dalam lingkungan keluarga yang baik, serta menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai jika anak tidak bisa diasuh oleh keluarga biologisnya.
- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster ini mencakup hak anak atas akses ke layanan kesehatan yang memadai, jaminan sosial, dan standar kehidupan yang layak, termasuk akses ke makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya.

e. **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Klaster ini berfokus pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki waktu luang untuk bermain, berolahraga, dan terlibat dalam kegiatan seni dan budaya.

f. **Klaster Perlindungan Khusus**

Klaster ini menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi ekonomi, dan situasi darurat seperti bencana alam atau konflik bersenjata.

#### **4. Anak Tidak Sekolah**

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak-anak berusia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak sedang bersekolah karena berbagai alasan, baik karena belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali, pernah sekolah namun kemudian putus, ataupun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah lulus. Organisasi UNICEF (2016) juga menyoroti bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan kelompok rentan yang tidak memperoleh hak pendidikan sebagaimana mestinya, yang berdampak pada peningkatan risiko eksploitasi kerja anak, pernikahan usia dini, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan pembangunan diri secara maksimal. Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Anak yang belum pernah masuk sekolah (*never entered school*);
- b. Anak yang pernah sekolah namun putus di tengah jalan (*drop out*); dan
- c. Anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (*not continuing*).

Ketiga kategori ini membutuhkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang berbeda, bergantung pada penyebab dan karakteristik sosial-ekonomi masing-masing.

Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dengan ekonomi sebagai penyebab utama. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan atau karena harus membantu mencari nafkah. Faktor sosial dan budaya, seperti pernikahan dini, rendahnya pendidikan orang tua, serta anggapan bahwa sekolah bukan prioritas, juga turut memengaruhi. Tilaar (2002) menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya menjangkau kelompok miskin dan terpinggirkan. Selain itu, motivasi belajar yang rendah, pengalaman negatif di sekolah, serta keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan semakin memperparah kondisi ATS, terutama di daerah pinggiran.

Anak yang tidak bersekolah menghadapi dampak serius, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, mereka kehilangan akses pendidikan formal, tidak mengembangkan keterampilan dasar, dan rentan terhadap eksploitasi kerja anak. Supriyanto (2019) menekankan bahwa tanpa pendidikan, anak akan kesulitan bersaing di dunia kerja yang menuntut keterampilan tinggi. Dalam jangka panjang, mereka menghadapi risiko pekerjaan tidak layak, penghasilan rendah, dan

terbatasnya mobilitas sosial. Secara lebih luas, tingginya angka ATS dapat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat kemiskinan struktural, serta menghambat pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif.

Pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai program untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan CSR guna meringankan biaya pendidikan keluarga miskin. Meski demikian, efektivitas program sangat bergantung pada akurasi data dan keberlanjutan. KemenPPPA (2020) menekankan pentingnya sistem pendataan seperti Pusdatin untuk identifikasi ATS secara sistematis. Alternatif pendidikan seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga dikembangkan untuk anak yang putus sekolah. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas turut diperlukan guna membangun kesadaran pentingnya pendidikan. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002, setiap anak berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi, sehingga penanganan ATS harus menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor dan masyarakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi menurunkan angka Anak Tidak Sekolah melalui Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori strategi Nawawi (2012), yang mencakup lima indikator keberhasilan strategi: profitabilitas publik, produktivitas tinggi, posisi kompetitif, keunggulan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia. Selain itu, digunakan pula analisis SWOT menurut Robinson dan Pearce (1997) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Metode observasi digunakan sebagai acuan utama pelaksanaan penelitian, dengan mengasumsikan informasi yang akurat dan tepat sebagai dasar dalam penyusunan laporan. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Kepala UPTD SPNF SKB Kabupaten Sidoarjo, Peserta didik SPNF SKB Kabupaten Sidoarjo yang sempat terdata ATS. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi data, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap strategi pengurangan ATS di tingkat sekolah dasar serta mendukung pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam Menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah sebagai Bentuk Kontribusi terhadap Pencapaian Kabupaten Layak Anak**

##### **a. Profitabilitas Publik**

Profitabilitas publik, menurut Nawawi (2012), mengacu pada seberapa besar manfaat strategi dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,

disertai efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tampak bahwa anggaran dialokasikan secara afirmatif kepada program yang menysasar kelompok rentan, seperti dana BOS afirmasi, pendidikan kesetaraan, dan bantuan PIP. Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo memanfaatkan dana pusat (BOP) dan daerah (APBD) secara optimal, dengan penggunaan yang terencana untuk kegiatan pembelajaran (projek P5, pelatihan keterampilan) dan kebutuhan operasional dasar. Sistem pelaporan yang transparan serta informasi publik yang terbuka menunjukkan akuntabilitas yang baik. Walau distribusi bantuan seperti PIP masih menghadapi kendala teknis di tingkat pusat, strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo tetap memberikan akses pendidikan yang gratis, fleksibel, dan manusiawi. Hal ini sejalan dengan Nawawi (2012) yang menekankan bahwa strategi dinilai berhasil jika mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meski belum ditopang oleh sarana yang ideal. Namun, untuk memperluas manfaat jangka panjang (*outcome*), diperlukan peningkatan dalam sistem integrasi data dan sinergi antar lembaga agar penyaluran bantuan lebih adaptif dan merata.

#### **b. Produktifitas Tinggi**

Indikator produktivitas dalam strategi publik menekankan pada hasil nyata dan berkelanjutan. Strategi penurunan Anak Tidak Sekolah oleh Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo menunjukkan produktivitas tinggi sebagaimana dimaknai oleh Nawawi (2012), yakni kemampuan menghasilkan *output* dan *outcome* secara optimal. Hal ini tercermin dari keberhasilan Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam merekrut, mempertahankan, dan meluluskan warga belajar dari berbagai kelompok usia tanpa ada kasus putus sekolah kembali. Pada tahun ajaran 2024/2025, tercatat 37 lulusan yang terdiri atas peserta usia produktif dan dewasa. Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo juga menerapkan kebijakan inklusif, membuka akses pendidikan secara fleksibel dan tanpa hambatan administratif, sehingga menjangkau Anak Tidak Sekolah dari berbagai wilayah seperti Tulangan. Pendekatan tutor sebagai mentor dan motivator turut memperkuat ikatan sosial dan semangat belajar peserta. Program ini tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga membangun kepercayaan diri, orientasi masa depan, dan kesiapan kerja. Meskipun secara administratif jumlah anak yang teraktivasi kembali baru mencapai 1.086 dari total 8.721 ATS, dampak program terbukti transformatif bagi peserta. Strategi ini telah mengintegrasikan sumber daya manusia, anggaran, dan metode pembelajaran secara efektif, serta menunjukkan sinergi antara *output* partisipasi dan *outcome* perubahan perilaku. Ke depan, strategi perlu diperkuat dengan pelacakan pasca-lulus dan penguatan kurikulum berbasis vokasional untuk memastikan keberlanjutan dampak pendidikan nonformal.

#### **c. Posisi Kompetitif / Keunggulan Organisasi**

Posisi kompetitif menurut Nawawi (2012) menunjukkan sejauh mana strategi mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sasaran. Posisi kompetitif menunjukkan sejauh mana sebuah strategi atau institusi diterima

dan dipercaya oleh masyarakat. Strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo menunjukkan posisi kompetitif yang kuat dalam menanggulangi Anak Tidak Sekolah melalui layanan pendidikan nonformal yang inklusif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Berbekal pendekatan waktu belajar yang adaptif, bebas biaya, serta pelatihan keterampilan seperti barista, komputer, dan tata boga, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo mampu menjadi alternatif yang setara dengan pendidikan formal. Promosi aktif melalui media sosial dan jejaring desa meningkatkan visibilitas lembaga, sementara testimoni warga belajar membentuk legitimasi sosial yang memperkuat citra institusi. Penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP dan SMA menegaskan pentingnya peran pendidikan nonformal salah satunya Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam menjangkau remaja rentan putus sekolah. Dengan dukungan keluarga dan masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga secara sosial sebagai lembaga yang memberikan dampak nyata. Kontribusi terhadap indikator Kabupaten Layak Anak, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan anak, semakin menegaskan posisi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo sebagai aktor kunci dalam ekosistem pendidikan inklusif. Mengacu pada Nawawi (2012), Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo telah memenuhi indikator posisi kompetitif melalui diferensiasi layanan, persepsi positif publik, dan kemampuan menjangkau kelompok terpinggirkan secara berkelanjutan dan strategis.

#### **d. Keunggulan Teknologi**

Keunggulan teknologi, menurut Nawawi (2012), mencerminkan kemampuan strategi dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, efisien, dan mudah diakses. Strategi pemanfaatan teknologi oleh Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo menunjukkan keunggulan adaptif dalam menjangkau Anak Tidak Sekolah melalui pendekatan digital yang inklusif dan kontekstual. Berlandaskan pandangan Nawawi (2012) bahwa teknologi merupakan elemen strategis, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo mengintegrasikan pembelajaran *daring* melalui *Google Classroom* dan *WhatsApp Group*, yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi warga belajar. Dinas Pendidikan turut mendukung melalui digitalisasi sistem pendataan Anak Tidak Sekolah berbasis Dapodik dan Pusdatin, serta pelatihan TIK bagi tutor. Selain media pembelajaran, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo juga membekali warga belajar dengan literasi digital seperti penggunaan komputer dasar, *Microsoft Office*, dan pemanfaatan internet secara bijak. Pendekatan *blended learning* ini meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian belajar, terutama bagi peserta yang tidak dapat hadir secara rutin. Hasilnya, warga belajar merasa lebih termotivasi dan tetap terhubung dengan materi pembelajaran. Teknologi di sini bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi katalisator transformasi pendidikan yang memperluas akses dan kualitas layanan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing institusi, serta membentuk ekosistem pendidikan nonformal yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo telah menunjukkan bahwa keunggulan teknologi berperan

penting dalam mempercepat penurunan angka Anak Tidak Sekolah secara berkelanjutan.

**e. Keunggulan SDM**

Berdasarkan teori Nawawi (2012), keberhasilan strategi sangat bergantung pada kapasitas dan adaptabilitas Sumber Daya Manusia dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mendukung penguatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan guru BK, kolaborasi dengan psikolog, dan sinergi lintas sektor seperti DP3AKB dan Dinas Sosial. Di tingkat pelaksana, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo menunjukkan keunggulan Sumber Daya Manusia melalui tutor berpendidikan tinggi dan beragam latar belakang, yang tidak hanya mengajar, tetapi juga bertindak sebagai mentor dan fasilitator sosial. Tutor menjalankan pendekatan humanistik, termasuk kunjungan rumah dan pendampingan emosional bagi warga belajar yang rentan secara psikososial. Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo juga aktif mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan berkelanjutan, seperti pelatihan komputer dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Dampaknya, lingkungan belajar menjadi inklusif dan suportif, meningkatkan retensi dan motivasi peserta didik. Testimoni warga belajar menunjukkan bahwa kehadiran tutor yang empatik dan responsif menciptakan rasa aman dan dihargai. Dengan demikian, Sumber Daya Manusia di Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo berperan strategis sebagai penggerak transformasi sosial dan pendidikan yang berkelanjutan, sejalan dengan indikator keberhasilan strategi publik menurut Nawawi.

**2. Analisis SWOT Strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam Menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah**

Strategi penurunan Anak Tidak Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dilakukan secara sistematis dan dianalisis berdasarkan lima indikator keberhasilan strategi menurut Nawawi (2012). Hasil analisis ini kemudian dipetakan dalam kerangka Analisis SWOT menurut Robbins dan Pearce (1997) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Pemetaan ini bertujuan menentukan posisi strategis lembaga serta menjadi dasar dalam perumusan strategi berkelanjutan jangka menengah dan panjang.

Tabel 4.7 Analisis SWOT Strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam Menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah

<b>Analisis Faktor Internal</b>	
<b>Strengths (Kelebihan)</b>	a) Program pendidikan gratis atau nol rupiah
	b) Tutor adaptif, humanis, dan berkompeten
	c) Pendekatan pembelajaran holistik
	d) Fasilitas dasar yang memadai
	e) Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan pendataan
	f) Citra positif di masyarakat (fleksibel, inklusif, dan terpercaya)
<b>Weakness (Kekurangan)</b>	a) Belum meratanya penerima bantuan PIP
	b) Keterbatasan akses teknologi bagi sebagian warga belajar

	c) Minimnya pelacakan pasca lulus warga belajar
	d) Beberapa masyarakat belum mengetahui program SKB dan persepsi publik terhadap pendidikan nonformal kurang maksimal.
<b>Analisis Faktor Eksternal</b>	
<b>Opportunities (Peluang)</b>	a) Kemitraan sektor swasta
	b) Dukungan regulasi dari program Kabupaten Layak Anak (KLA)
	c) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
	d) Perkembangan teknologi digital
<b>Threats (Ancaman)</b>	a) Fluktuasi partisipasi warga belajar akibat mobilitas sosial ekonomi
	b) Resiko warga belajar kembali tidak bersekolah
	c) Ketergantungan pada anggaran pusat atau daerah

Analisis SWOT di atas memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi strategi penurunan Anak Tidak Sekolah di Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo. Untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki, memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi kelemahan internal, serta mengantisipasi potensi ancaman dari lingkungan eksternal, maka dibutuhkan formulasi strategi yang tepat. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan matriks strategi TOWS yang mengombinasikan keempat elemen SWOT ke dalam alternatif strategi implementatif.

Tabel 4.8 Matriks Strategi TOWS

	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weakness (W)</b>
<b>Faktor Internal dan Faktor Eksternal</b>	1) Program pendidikan gratis atau nol rupiah; 2) Tutor adaptif, humanis, dan berkompeten; 3) Pendekatan pembelajaran holistik; 4) Fasilitas dasar yang memadai; 5) Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan pendataan; 6) Citra positif di masyarakat (fleksibel, inklusif, dan terpercaya).	1) Belum meratanya penerima bantuan PIP; 2) Keterbatasan akses teknologi bagi sebagian warga belajar; 3) Minimnya pelacakan pasca lulus warga belajar; 4) Beberapa masyarakat belum mengetahui program SKB dan persepsi publik terhadap pendidikan nonformal kurang maksimal.
<b>Opportunities (O)</b>	<b>Strengths-Opportunities (S-O)</b>	<b>Weakness-Opportunities (WO)</b>
1) Kemitraan sektor swasta; 2) Dukungan regulasi dari program	1) Mengembangkan layanan pelatihan vokasional untuk masyarakat umum melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan program KLA,	1) Menjalin kemitraan CSR sektor swasta untuk menutup celah bantuan seperti PIP dan penyediaan perangkat digital bagi warga belajar.

<p>Kabupaten Layak Anak (KLA); 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; 4) Perkembangan teknologi digital.</p>	<p>sehingga meningkatkan daya tarik dan fungsi sosial SKB. 2) Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan tutor adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menjangkau peserta didik yang tidak dapat hadir secara tatap muka. 3) Memperluas promosi citra positif SKB melalui media sosial dan kanal digital, memanfaatkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.</p>	<p>2) Menyusun sistem pelacakan alumni pasca-lulus untuk mengukur dampak jangka panjang pendidikan nonformal dan mencegah angka ATS kembali meningkat. 3) Meningkatkan literasi masyarakat tentang SKB melalui kampanye edukatif berbasis media digital yang menasar desa/kelurahan dan komunitas.</p>
<b>Threats (T)</b>	<b>Strengths-Threats (ST)</b>	<b>Weakness-Threats (WT)</b>
<p>1) Fluktuasi partisipasi warga belajar akibat mobilitas sosial ekonomi; 2) Resiko warga belajar kembali tidak bersekolah; 3) Ketergantungan pada anggaran pusat atau APBD.</p>	<p>1) Menerapkan <i>blended learning</i> (kombinasi daring dan luring) guna menjaga kontinuitas pembelajaran meskipun peserta mengalami mobilitas atau kendala sosial ekonomi. 2) Memperkuat peran tutor sebagai mentor dan pendamping sosial, sehingga mampu mencegah warga belajar kembali putus sekolah. 3) Mengupayakan alokasi anggaran daerah secara mandiri, memanfaatkan legitimasi publik dan capaian SKB untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.</p>	<p>1) Membangun sistem pemetaan risiko putus sekolah berbasis lokal, agar potensi ATS baru bisa dicegah lebih dini melalui intervensi cepat. 2) Melibatkan alumni sebagai agen promosi dan motivator, untuk mengubah persepsi negatif terhadap pendidikan nonformal dan menjaga semangat warga belajar. 3) Menyediakan modul luring/offline dan pelatihan keluarga, guna mengatasi keterbatasan teknologi dan memperkuat ekosistem belajar di rumah.</p>

Dengan menggunakan matriks strategi TOWS ini, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu merancang langkah-langkah taktis yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat posisi strategis lembaga dalam jangka panjang. Setiap strategi yang dikembangkan bertujuan untuk memperbesar dampak positif program, memperkecil risiko kegagalan, serta menciptakan ekosistem pendidikan nonformal yang adaptif, berdaya ubah, dan inklusif. Dengan pendekatan ini, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo tidak hanya menjadi lembaga penyedia layanan pendidikan kesetaraan, tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial dalam upaya pengentasan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan.

## **E. KESIMPULAN**

Strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah sebagai kontribusi terhadap pencapaian Kabupaten Layak Anak telah dilaksanakan secara terstruktur dan terarah berdasarkan lima indikator keberhasilan strategi menurut Nawawi (2012), yaitu profitabilitas publik, produktivitas tinggi, posisi kompetitif, keunggulan teknologi, dan keunggulan Sumber Daya Manusia. Dari sisi profitabilitas publik, Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo menyediakan layanan pendidikan gratis yang inklusif dan efisien, meskipun distribusi bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) belum sepenuhnya merata. Dalam hal produktivitas, lembaga ini berhasil mengaktifkan kembali Anak Tidak Sekolah serta mempertahankan tingkat partisipasi dan kelulusan yang tinggi, berkat pendekatan tutor yang personal dan humanis, meskipun pelacakan pasca-lulus masih minim. Posisi kompetitif Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo ditunjukkan melalui layanan yang fleksibel, holistik, tanpa biaya, serta adanya pelatihan vokasional, walau belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh masyarakat Sidoarjo. Keunggulan teknologi tercermin dari pemanfaatan sistem digital seperti Dapodik, Pusdatin, *Google Classroom*, dan *WhatsApp Group* yang meningkatkan efisiensi pembelajaran serta pendataan Anak Tidak Sekolah. Terakhir, keberhasilan strategi Sanggar Kegiatan Belajar Sidoarjo sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia berkualitas, di mana para tutor menunjukkan komitmen dan empati tinggi dalam membina warga belajar. Ke depan, pengembangan strategi perlu diarahkan pada optimalisasi integrasi data pusat-daerah untuk menjamin kelayakan penerima bantuan seperti PIP, penerapan *tracer study* guna mengukur keberlanjutan hasil pendidikan, serta perluasan sosialisasi melalui media sosial, kemitraan desa, dan komunitas lokal. Langkah-langkah ini penting agar strategi tidak hanya menasar pemenuhan indikator administratif, tetapi benar-benar berdampak jangka panjang, memberdayakan warga belajar, dan membentuk ekosistem pendidikan nonformal yang adaptif dan inklusif di Kabupaten Sidoarjo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bidiknasional. (n.d.). *Tingginya ATS dan APS di Sidoarjo*.  
<https://bidiknasional.com/2025/02/17/tingginya-ats-dan-aps-komisi-d-dprd-kabupaten-sidoarjo-gelar-hearing-bersama-dinas-pendidikan-dan-kemenag/>
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. (2021). *Rencana Strategis 2021–2026*.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Laporan Validasi Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024*.
- Jdih.kemennppa.go.id. (2022). Permen PPPA No.12 Tahun. 2022. 7787, 33(8.5.2017), 2003–2005. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Kemendikbudristek. (2023). *Profil Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.
- Nawawi, H. (2012). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (1997). *Strategic management: Formulation, implementation, and control* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Website Peraturan BPK, l*, 1–7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>
- Rahmat, Y. (n.d.). *Ke-4 Kalinya Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak*. InfoPublik. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/761833/ke-4-kalinya-kabupaten-sidoarjo-raih-penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak>
- Sidoarjo, K. (2023). Perda Sidoarjo No.2 Tahun 2023. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002. (2002). *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Arsyad, Azhar,. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- UNICEF. (2016). *The State of the World's Children: A Fair Chance for Every Child*. New York: UNICEF.